



Strategi Pembangunan Desa Di Daerah Tertinggal Pada Kawasan Konservasi Bukit Rimbang Bukit Baling Desa Batu Sanggan

Samsi Nurzaman¹ Arief Rifa'i²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
sastranurzaman@student.uir.ac.id

²Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
ariefrifai@soc.uir.ac.id

Received : July 5, 2019; Accepted : September 5, 2019

DOI : 10.25299/jiap.2019.vol5(2).4347

Abstract

The implementation of village development is a form of implementation of the form of implementation of development programs in the form of multidimensional as a form of the implementation of the State's objectives in achieving the implementation of village development. It aims to make development policies truly strategic. The geographical shape of the area of Indonesia influences the development policies to be taken, as does the development of villages in conservation areas. Because it involves the regulation of conservation area regulations so that any form of development must be in accordance with the provisions of the Conservation Area Act. Batu Sanggan Village is a village located in the Bukit Rimbang Bukit Baling Conservation area. This is a special concern about the Analysis of Development Strategies that will be carried out, because basically the development carried out in general is not the same as development in other villages. Thus the need for a village development strategy that is analyzed in depth so that this is sought in analyzing what forms of development can be carried out in the conservation area, so that this is expected to realize an equitable and equitable development achievement. However this cannot be done optimally, in essence it concerns overlapping regulations regarding village development with conservation area regulations, so that the most very sad is that all forms of village planning and development are hampered due to the Batu Sanggan village problem which is located in the conservation area.

Key Words : Strategy, Development, Village, Conservation Area

Abstrak

Pelaksanaan pembangunan Desa merupakan bentuk implementasi dari bentuk pelaksanaan program pembangunan dalam bentuk multidimensional sebagai bentuk pelaksanaan tujuan Negara dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan Desa. Dalam rangka pelaksanaannya pembangunan yang dilakukan harus melalui analisis sekaligus perencanaan yang matang. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan benar-benar strategis. Bentuk geografis daerah Indonesia mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan diambil, demikian pula pembangunan desa pada kawasan konservasi. Karena menyangkut pada aturan regulasi kawasan konservasi sehingga bentuk pembangunan apapun tentunya harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kawasan Konservasi. Desa Batu Sanggan merupakan Desa yang berada pada kawasan Konservasi Bukit Rimbang Bukit Baling. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus tentang Analisis Strategi Pembangunan yang akan dilakukan, karena pada dasarnya Pembangunan yang dilakukan secara umum tidak sama seperti pembangunan di Desa-Desa lainnya. Dengan demikian perlu adanya sebuah strategi pembangunan desa yang dianalisis secara mendalam sehingga hal ini diupayakan dalam menganalisis pada bentuk-bentuk pembangunan apa saja yang dapat dilakukan pada kawasan konservasi tersebut, sehingga hal ini diharapkan dapat terwujudnya sebuah pencapaian pembangunan

yang merata dan berkeadilan. Namun hal ini tidak bisa terlaksana dengan optimal, pada intinya menyangkut tentang tumpang tindihnya regulasi tentang pembangunan desa dengan regulasi kawasan konservasi, sehingga yang paling sangat miris adalah segala bentuk perencanaan dan pembangunan desa terhambat karena masalah desa Batu Sanggan yang letaknya berada pada kawasan konservasi.

Key Words : Startegi, Pembangunan, Desa, Kawasan Konservasi

Pendahuluan

Indonesia adalah merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah negara yang luas serta jumlah penduduk yang sangat banyak disampaing negara-negara lain, salah satu negara berkembang, Indonesia juga merupakan negara yang secara potensi memiliki kemampuan alam rangka mengola segala memampuannya dalam bersaing dengan segala potensi negaa yang dimiliki. Strategi merupakan sebuah cara yang dilakukan disalam mendapatkan dan mencapai sebuah tujuan ataupun sasaran, strategi ini menjadi bahan dalam sebuah perumusan dan perencanaan secara penuh didalam melakkan sesuatu. Melalui BAPPEDA Kabupaten Kampar perencanaan pembangunan merupakan hal penting yang dilakukan didalam pembangunan sehingga bentuk tujuan yang akan dicapai dapat diraih secara optimal, melalui Bappeda Kabupaten Kampar strategi pembangunan yang dirumuskan menjadi tolak ukur dari keberhasilan, dengan adanya perumusan yang matang, dilakukan analisa yang baik secara menyeluruh dengan memperhatikan segala potensi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi, hal ini menjadi alasan mengapa begitu penting strategi dilakukan dalam rangka melakukan pembangunan. Dengan demikian diharapkan segala bentuk formulasi yang dikeluarkan oleh BAPPEDA menjadi formulasi pembangunan yang jitu didalam pemecahan masalah sekaligus menjadi program pemecahan masalah

dalam bidang pembangunan dalam hal infrastruktur ataupun pelayanan dalam bentuk sarana dan prasarana.

Dengan beberapa indikator dan masalah lingkungan menjadikan beberapa bentuk strategi yang muncul, dan menyangkut dalam visi misi yang dilakukan dalam rangka pencapaian hasil pembangunan maka, dilakukan beberapa bentuk perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (bottom up)
3. Meningkatkan kualitas perencanaan guna meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan fungsi manajemen perencanaan pembangunan daerah
5. Mengoptimalkan fungsi manajemen perencanaan dan mewujudkan sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Beberapa ketentuan diatan menjadi beberapa bentuk keputusan yang menjadi sebuah kebijakan dan menjadi acuan didalam perencanaan pembangunan serta dalam rangka pengembangan ataupun pelaksanaan program-program serta seluruh dari kegiatan, landasan ini dimaksudkan untuk tercapainya kelancaran dan kesamaan didalam mewujudkan sasaran dari visi dan misi dari perangkat kerja daerah.

Yang dimaksud dengan Desa Tertinggal merupakan kawasan perpedesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan/daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (Infrastruktur) perhubungan, sehingga menghambat

pertumbuhan/perkembangan kawasan. Atas dasar definisi yang dijelaskan sebelumnya kriteria yang menentukan Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu :

1. Daerah Perdesaan (Unit Administratif Desa)
2. Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang / Tidak Ada
 - a. Jalan
 - b. Jembatan
3. Secara Geografis Jauh dari Pusat Pertumbuhan
4. Ada Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah lain

Untuk Desa terpencil, penetapan Parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap Kriteria yang bersifat kualitatif yaitu:

1. Kawasan Permukiman
Kriteria : Kawasan perdesaan
Parameter : Unit Administratif Desa
2. Aksesibilitas
Kriteria : Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas (Jalan/Jembatan/Dermaga)
Parameter : Tidak Ada
3. Jarak
Kriteria : Jarak dari Pusat Pertumbuhan
Parameter: Lebih dari (>) 100 Km
4. Isolasi Geografis
Kriteria : Faktor Isolasi Geografis
Parameter : Ada

Konservasi merupakan bentuk kegiatan pelestarian atau perlindungan. Secara bahasa dapat diartikan, dilihat dari sisi etimologis konservasi , (Inggris) Conservation memiliki arti/makna sebagai pelestarian atau perlindungan, wilayah konservasi juga adalah bentuk dari sebuah

kawasan hutan yang memiliki beberapa bentuk ciri khas tertentu dan juga mempunyai beberapa fungsi utama seperti pengawetan dari beberapa jenis hewan, tumbuhan bahkan hingga pada bentuk ekosistem, Kawasan Konservasi merupakan wilayah yang secara hukum diakui pemerintah dan juga diatur didalam undang-undang dalam upaya perlindungannya, usaha ini bertujuan dalam rangka mempertahankan dari potensi dan sumberdaya yang ada, dan tidak lain upaya perlindungan hutan ini juga merupakan usaha pemerintah didalam menjaga kepentingan negara, dengan beberapa kepentingan sesuai dengan ketentuan negara, tujuan dari kepentingan konservasi ini berbeda bagi tiap negara, bisa jadi Tiap negara memiliki kriteria tersendiri dalam rangka penetapan kawasan sebagai konservasi, sehingga masing-masing negara mampu memiliki tujuan dan perlakuan yang mungkin berbeda.

Menurut keputusan Keputusan Menteri Keutanan Republik Indonesia Nomor:Sk. 3977/Menhut-Vii/Kuh/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling yaitu Seluas 141.226.25. (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Dan Dua Puluh Lima Perseratus) Hektare Dikabupaten Kampar Dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan demikian dapat dilihat bahwa kawasan Bukit rimbang Bukit baling merupakan Kawasan konservasi.

Berdasarkan regulasi tersebut, Indonesia membentuk sebuah regulasi dengan adanya kebijakan dan peraturan konservasi ini, negara mampu mengelola dan memanfaatkan segala bentuk potensi dan sumberdaya yang ada baik alam atau hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana sekaligus melalui kebijakan ini menjadi sebuah jaminan dari

keberlangsungan dan juga diharapkan agar tetap terjaga dan terpelihara segala bentuk sumberdaya alam dan hayati yang ada agar tetap tersedia di alam dan juga diharapkan supaya keanekaragaman ekosistem dapat tetap terjaga kualitas dan nilainya. Wilayah yang biasa disebut sebagai cagar alam dan suaka margasatwa merupakan suatu Kawasan Suaka Alam (KSA), adapun bentuk lain dari kawasan itu seperti taman nasional, taman wisata, dan taman hutan raya merupakan jenis kawasan yang masuk pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Didalam pelaksanaan kegiatan konservasi ini ada beberapa lembaga yang diberi tugas dan memiliki wewenang dalam rangka pengelolaan dan perlindungan pada kawasan konservasi, untuk provinsi riau peran ini dilaksanakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Dari tugas dan fungsi balai KSDA dapat diketahui bahwa peran balai KSDA sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem hutan dan menjadi acuan kelestarian dari kawasan konservasi tersebut, sehingga dapat kita pahami pula bahwa kawasan konservasi ini memiliki sebuah keunikan tersendiri dalam rangka pelaksanaan segala kegiatan yang melibatkan kawasan konservasi tersebut.

Yang menjadi pembahasan penting dari kawasan konservasi ini adalah, bahwa kegiatan yang dilakukan tidaklah semudah dengan kegiatan yang dilakukan di tempat lain, hal ini menyangkut pada fungsi utama kawasan yang benar-benar menjaga kelestarian dan fungsi asal dari kawasan, sehingga dalam kasus ini menyangkut pada kebijakan sekaligus kegiatan pembangunan desa yang akan dilakukan di kawasan konservasi tidaklah sama dengan pembangunan yang dilakukan di wilayah desa pada umumnya dikarenakan kegiatan tersebut

akan berhadapan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di daerah kawasan konservasi.

Desa Batu Sanggan merupakan desa yang berada di dalam kawasan konservasi, keberadaannya memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajah pembangunan desa yang semestinya harus secara penuh dilakukan secara menyeluruh, tidaklah sama ketika kita melihat pembangunan di desa Batu Sanggan ini, beberapa kegiatan pembangunan ini berada pada pengawasan dari lembaga yang berwenang dalam mengelola kawasan konservasi. Sehingga sering terlihat adanya kegiatan masyarakat yang sering berhadapan langsung dengan peraturan kawasan konservasi.

Hal ini merupakan gambaran tentang keadaan Desa Batu Sanggan yang mana sangat perlu adanya bentuk pembangunan yang benar-benar membantu dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Disamping keadaan pembangunan yang kerang berjalan hal ini juga disebabkan karena adanya peraturan perundang-undangan konservasi yang mengatur tentang segala pembangunan yang akan dibuat, sehingga hal ini menjadi faktor melemahnya tingkat dan kualitas pembangunan yang dilakukan,

Sehingga demikian tidak hanya jalan tetapi pada pembangunan-pembangunan besar lainnya pun akan mengalami kendala sebagaimana pembangunan penguatan kualitas turbin untuk penerangan bahkan pada program pembangunan dalam rangka pengadaan jaringan telekomunikasi. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Batu Sanggan.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Strategi

Menurut Hunger dan Wheelen mengartikan bahwa Manajemen strategis diartikan tentang sebuah proses dari beberapa rangkaian dari hasil keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dari unsur manajerial yang keputusan tersebut merupakan sebuah ukuran dari keberhasilan dan menjadi panutan dari tujuan kinerja suatu organisasi, hal ini meliputi dari proses observasi lingkungan perumusan strategi hingga pada evaluasi dan pengawasan. Manajemen strategis ini merupakan sebuah sistem yang pelaksanaannya dilakukan dari awal hingga akhir hingga tujuan dari keputusan yang telah ditentukan sebelumnya yang telah ditentukan dalam perencanaan tercapai sebagai hasil dari keputusan-keputusan yang telah diambil.

Manajemen Strategis juga bisa diartikan sebagai alat yang digunakan dalam rangka mengendalikan suatu organisasi sehingga dimaksudkan agar tujuan dari perencanaan dari tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal (Sufian Hamim, 2003, hal. 39)

Dalam rangka mengupas tuntas dari penelitian ini, ada beberapa teori yang dijadikan dalam dasar analisis penelitian di Desa Batu Sanggan adalah teori (Adisasmita, 2013, hal. 76) yaitu Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa setidaknya ada empat strategi yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. The grow strategy (Strategi Pertumbuhan) ststrategi yang dirumuskan dalam rangka upaya pencapaian keberhasilan pembangunan dari segi pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan dari tingkat kesejahteraan, dan perwujudan pembangunan ini dimaksudkan untuk

menunjukkan dari bentuk keberhasilan pembangunan yang dilakukan.

2. The Welfare Setrategy (Strategi Kesejahteraan) beberapa yang mnjadi sasaran daari strategi ini adalah upaya dalam melakukan pembangunan yang bertujuan pada peningkatan kualitas dan taaf hidup, seperti pada pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, hal ini salah satu bentuk ppemerataan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat dan dan kualitas hidup.
3. The Responsive Setrategy (Strategi Tanggap Pada Kebutuhan Masyarakat) strategi ini dilakukan pada prinsip pelaksanaan pembangunan yang dasarnya hasil dari kesepakatan dengan ini berarti bahwa, pembangunan yang dilakukan harus mengacu pada bentuk pembangunan apa yag benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, perumusan serta perencanaan dari program pembangunan ini juga dilakukan berdasarkan bentuk pembangunan prioritas yang harus dilaksanakan, beberapa prodak ri pada hasil perencanaan peroritas pembanguan ini biasanya disajikan pada hasil Musrembang. Tujuan dari strategi ini adalah bagaimana dampak pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dimaksudkan engan adanya strategi ini pembangunan yang dilakukan seuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya yaitu tentang masalah kesehatan,, pendidikan dan juga masalah-masalah kelembagaan lainnya yang sangat melekat di kehidupan masyarakat. ini menjadi alasan mengapa strategi ini harus dilakukan demi terciptanya pembangunan yang

mendukung dari peningkatan kualitas hidup dan ketahanan sosial.

4. The Integrated Or Holistic Strategy (Strategi Terpadu atau Strategi Menyeluruh). Analisis strategi ini dirumuskan dalam melakukan suatu formulasi yang terfokus bahwa pembangunan yang dilakukan harus kiranya berbasis pada azas pemerataan dan azas keadilan. Dengan ini dimaksudkan tak hanya pembangunan yang terus dilakukan namun juga bagaimana cara tentang potensi wilayah juga mampu dikembangkan, sehingga dalam rangka melakukan pembangunan, setiap daerah mampu kiranya bersaing dengan daerah lain untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik.

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mencakup dari 2 bentuk pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah bentuk dari keseluruhan sebuah proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan di selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan biasanya di definisikan sebagai sebuah rangkaian dari usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. (Siagian, Sondang P, 2014, hal. 7).

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi Negara atau

daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Menurut Arthur W. Lewis (Sjafrizal, 2014, hal. 24) mengartikan perencanaan pembangunan sebagai berikut : “ adalah merupakan kumpulan dari suatu kebijaksanaan dan merupakan program dalam bentuk pembangunan dalam rangka mempengaruhi beberapa masyarakat swasta untuk menggunakan seluruh potensi yang tersedia untuk diberdayakan secara optimal dan produktif”.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan dasar dari legalitas dalam rangka kegiatan pembangunan yang dilaksanakan hal ini merupakan bentuk dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) hal ini juga menyangkut pada bentuk tata cara suatu perencanaan pembangunan yang bertujuan dalam rangka menghasilkan perencanaan pembangunan untuk jangka waktu berkala, dalam arti baik dalam jangka pendek menengah, maupun untuk jangka panjang yang mana kegiatan pembangunan ini dilakukan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Metode

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih

bersifat kualitatif. Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang di peroleh di jadikan sebagai dasar untuk menggambarkan analisis strategi pembangunan pada kawasan konservasi di Desa Batu Sanggan Kabupaten kampar.

Hasil dan Pembahasan

The Grow Strategy (Strategi Pertumbuhan)

Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan di Desa Batu Sanggan dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan yang selama ini berjalan di Desa Batu Sanggan belum sepenuhnya mengacu pada peningkatan ekonomi dan di sini peneliti mendapatkan bahwa BAPPEDA belum sepenuhnya membuat sebuah program pembangunan yang berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Batu sanggan, bahkan jika di lihat bahwa keadaan Desa Batu Sanggan ini memerlukan perhatian lebih. Sehingga dengan demikian dengan memperhatikan permasalahan yang ada di Desa Batu Snaggan Ini dapat kiranya membuat sebuah kebijakan dan program yang berbasis dalam pemecahan permasalahan masyarakat dan peningkatan taraf ketahanan sosial.

The Walfare Strategy (Strategi Kesejahteraan)

Dapat di simpulkan bahwa begitu rendahnya kualitas kesehatan di desa Batu Sanggan ini, sangat penting seharusnya kita memperhatikan masalah kesehatan, dapat di lihat juga dari pernyataan diatas bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar apabila sesuatu terjadi, sehingga masalah keberadaan tenaga medis dan sarana prasarananya ini sangat penting

juga keberadaannya. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi ketika sesuatu terjadi dan tidak ada yang menangani dan tidak ada yang sanggup menangani pnyakit atau keadaan tertentu, maka kita akan menyalahkan siapa. Dengan demikian perlu adanya sikap yang serius masalah kesehatan ini demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Desa Bau Sanggan ini.

The Responsive Strategy (Strategi tanggap pada Kebutuhan)

Di simpulkan bahwa bahwa selain jalan beberapa masalah lain juga yang sangat dipelukn oleh masyarakat desa itu adalah jarinan telekomunikasi, hal ini menjadikan kita semakin faham bahwa banyak sekali masaah yang selama ini menjadi kendala dari perkembangannya daerah di Desa Batu Sanggan ini. Berdasarkan hasil Observasi yang penulis lakukan di Desa Batu Sanggan penulis dapat menyimpulkan tentang kebutuhan pembangunan di Desa Batu Sanggan adalah Akses jalan, atau Interpretasi antar Desa, permasalahan ini menjadi seruius jika kita mempertimbangkan bebrapa biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan jalur air, ini ternyata memakan biaya yang lebih besar dari pada akses darat, Maka dari itu peneliti mendapatkan data bahwa masyarakat Desa Batu Sanggan memerlukan sebuah pembaharuan dari pembangunan interpretasi jalan ini bisa dilakukan, diharapkan apabila ini dilakukan akan membantu dna menekan biaya yang akan dikeluarkan oleh Masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

The Integrated Or Holistic Setrategy (strategi terpadu dan menyeluruh)

Ada sebuah permasalahan serius yang terjadi di desa Batu Sanggan dalam

rangka pembangunan, kita melihat bahwa akan ada pengeluaran biaya tambahan ketika akan melakukan pembangunan, dikarenakan akses kesana yang jauh, bahkan seperti yang disampaikan disana adalah, untuk semua bahan logistik itu semua di angkut dengan sampan melalui sungai, bahkan dikatakan juga sampai berhari-hari sehingga dengan ini akan ada sebuah pembiayaan tambahan dan tidak sedikit, banyak sekali kendala yang di hadapi warga desa, sehingga dalam rangka pemerataan dan keadilan dalam pembangunan tidak terlihat secara signifikan disana, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dalam kegiatan di pemerintahan desa sudah sangat baik, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan menalami kendala.

Kesimpulan

Dalam rangka pembangunan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan sbagaimana mestinya, disamping karena jauhnya akses menuju Desa, Desa Batu Sanggan ini juga minim dalam bidang infrastruktur jalan, sehingga yang menjadikan kegiatan dari perekonomian dan kegiatan lain tidak lancar, sehingga dengan akses yang sulit menjadikan terhambatnya segala hal bahkan sampai pada proses pembangunan, ini menjadi alasan sekaligus penyebab dari kurang merata pembangunan yang dilakukan, sehingga pembangunan yang dilakukan pun tidak sama dengan pembangunan di desa desa seperti pada umumnya, inilah gambaran umum tentang Desa Batu Sanggan berkenaan pembangunan yang sampai saat ini belum terlaksananya prispip pembangunan yang berlandaskan pada pemerataan dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2013). Pembangunan Perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo. (2013). Pembangunan Perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah. (2015). Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung.
- Ferrel Heady. (2001). Public Administration : a comparative perspective / Ferrel Heady . New York: Marcel Dekker.
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Garava Media.
- Pasolong, h. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Rivai, V. d. (2013). Commmeral Bank Mnanagement: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Sedarmayanti. (2016). Manajemen Strategi. Bandung: Aditama.
- Siagian. (2003). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2003). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2003). Filsafat Administrasi. jakarta: bumi aksara.
- siagian, S. P. (2012). Manajemen Statejik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. (2014). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto. (2005). Pengantar Manajemen. Bandung: Bumi Aksara.

- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sufian Hamim, M. (2003). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan. Pekanbaru: Uir Press.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&V. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2009). Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, H. (2013). Manajemen. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2002). Teori dan Press Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wirman, Syafri. (2012). Studi Administrasi Publik. Jatinangor: Erlangga.